

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan implementasi yang tepat, melalui penerapan kebijakan ini pemerintah berupaya memperkuat struktur perekonomian dalam negeri dengan mendorong tumbuhnya kapasitas produksi dalam negeri serta menekan ketergantungan terhadap barang impor (Yulianti, 2023). Apabila dilakukan secara konsisten dan terarah, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sektor industri, sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Menurut Nurliyanti dkk dalam (Hidayat et al., 2021). Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak hanya memberikan pengaruh dari sisi ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat dan konsumen terhadap produk lokal. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri berpotensi menumbuhkan rasa kebanggaan nasional yang berperan dalam memperkuat identitas kolektif bangsa. Dalam konteks tersebut, konsumen yang memilih dan mendukung produk lokal memandang tindakannya sebagai bentuk kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan sosial. Kondisi ini mendorong terbentuknya loyalitas konsumen terhadap merek lokal, yang selanjutnya dapat meningkatkan daya saing industri lokal (Wedagama et al., 2025).

Tingkat Komponen Dalam Negeri pada dasarnya dirancang sebagai kebijakan untuk mendorong optimalisasi penggunaan produk lokal dalam berbagai proyek pemerintah. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap penggunaan produk dalam negeri, peningkatan kapasitas produksi nasional, serta penciptaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal (Darmada, 2022). Selain bertujuan untuk mengurangi tingkat ketergantungan Indonesia terhadap produk impor yang selama ini masih tergolong tinggi, penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kemandirian serta daya saing industri nasional. Melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, diharapkan struktur industri domestik dapat semakin kuat dan berkelanjutan. Namun demikian, pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri di

Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan kapasitas dan kesiapan industri lokal, perbedaan kualitas dan spesifikasi produk, hingga kendala dalam aspek pengawasan serta implementasi kebijakan di tingkat nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan TKDN memerlukan upaya yang lebih terintegrasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Berdasarkan Peraturan (Pemerintah, 2018) Produk Dalam Negeri (PDN) tidak hanya terbatas pada barang fisik semata, tetapi juga mencakup jasa, termasuk kegiatan perancangan, desain, dan rekayasa. Produk tersebut dihasilkan atau dilaksanakan oleh perusahaan yang melakukan investasi serta menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia, dengan memanfaatkan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia. Selain itu, produk dalam negeri juga dihasilkan melalui penggunaan bahan baku, komponen, dan sumber daya pendukung lainnya yang berasal dari dalam negeri, sehingga memberikan kontribusi langsung terhadap penguatan perekonomian nasional. Upaya ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses operasional tetapi juga membuka peluang baru dalam inovasi produk maupun jasa, serta meningkatkan daya saing di pasar global. Oleh karena itu, sektor jasa konstruksi harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam manajemen proyek konstruksi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat pemanfaatan produk dalam negeri serta praktik penggunaannya dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi dan saran yang berguna untuk meningkatkan penerapan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) guna mendukung penggunaan produk lokal pada industri konstruksi Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang pada tugas akhir ini, Adapun rumusan masalah yang disusun oleh Penulis:

1. Berapa nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri pada proyek konstruksi gedung bertingkat?
2. Berapa nilai Bobot Manfaat Perusahaan pada proyek konstruksi gedung bertingkat?
3. Berapa nilai penggabungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat perusahaan pada proyek konstruksi gedung bertingkat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada tugas akhir ini dapat diambil beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengetahui nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri pada proyek gedung bertingkat.
2. Mengetahui nilai Bobot Manfaat Perusahaan pada proyek konstruksi gedung bertingkat.
3. Mengetahui nilai penggabungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan pada proyek konstruksi gedung bertingkat.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam tugas akhir ini ditetapkan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian agar pembahasan tetap terarah dan tidak melebar. Penelitian ini secara khusus meninjau perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterapkan pada proyek konstruksi gedung bertingkat, dengan fokus utama pada pekerjaan struktur sebagai bagian yang memiliki peran signifikan dalam penggunaan material dan komponen konstruksi. Aspek pekerjaan lain di luar pekerjaan struktur tidak menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen proyek yang relevan, antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), daftar harga satuan, serta spesifikasi teknis yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Seluruh data tersebut dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan analisis perhitungan TKDN guna memperoleh hasil yang sesuai dengan kondisi proyek yang diteliti.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yangh didapatkan dari tugas akhir ini, yaitu:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi penyedia jasa konstruksi dalam memahami serta melakukan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diterapkan secara lebih efektif dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
2. Diharapkan penelitian ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha serta masyarakat mengenai pentingnya penggunaan produk dalam negeri, sejalan dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
3. Memberi pengetahuan dan pemahaman kepada penulis mengenai tentang pentingnya kontribusi penggunaan barang dan jasa yang di produksi di dalam negeri dalam pembangunan ekonomi.